HUKUM BISNIS

Fenomena Kosmetik Palsu: Marak karena Permintaan dari Konsumen?

Oleh **Jerry Shalmont***

Tidak dapat dipungkiri perkembangan transaksi *online* melalui *e-commerce* mengalami kemajuan pesat sejak pandemi Covid-19 di tahun 2020. Dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah yang membatasi pergerakan masyarakat, tentu saja membuat pembelanjaan yang sebelumnya dilakukan secara *offline* menjadi *online*.

Walaupun kondisi saat ini perlahan-lahan sudah menunjukkan kembalinya kegiatan-kegiatan secara tatap muka, tentu saja kebiasaan belanja *online* untuk barang kebutuhan telah terbentuk dan konsumen cenderung sudah merasa nyaman untuk membeli segala kebutuhan secara *online*, ditambah dengan banyaknya promosi yang ditawarkan di berbagai *marketplace* dari sisi *platform* maupun *brand*.

Sayangnya, perkembangan transaksi di *marketplace* juga membuka peluang peredaran kosmetik palsu. Mengacu pada teori ekonomi mengenai permintaan dan penawaran, tentu saja penawaran akan berkembang jika didukung adanya permintaan dari konsumen.

Lalu mengapa konsumen lebih memilih untuk membeli kosmetik palsu dibandingkan dengan yang asli? Berbagai faktor cukup berperan dalam fenomena ini. Peranan media sosial yang lekat dengan kehidupan sehari-hari merupakan salah satunya.

Banyaknya konten yang mempromosikan kosmetik baru secara terus menerus lama kelamaan akan membuat calon konsumen merasa tidak ingin tertinggal dan akhirnya ingin membeli dan mencoba produk kecantikan tersebut. Hal ini dapat terlihat dari total waktu yang dihabiskan untuk berinteraksi di sosial media. Secara tidak sadar, segala promosi maupun konten yang dilihat ini membuat keinginan untuk berbelanja menjadi meningkat.

Faktor lainnya yaitu harga, beberapa konsumen secara sadar memang memilih untuk membeli kosmetik palsu karena menganggap tidak ada perbedaan signifikan antara kosmetik asli maupun palsu karena dari sisi tampilan memang kosmetik asli dan palsu saat ini cukup sulit dibedakan.

Tentu saja asumsi ini tidak berdasar karena dalam proses produksi kosmetik, terdapat beberapa standar keamanan yang harus dipenuhi oleh produsen untuk memastikan tidak adanya efek samping dari penggunaan kosmetik tersebut.

Namun jika membandingkan dengan proses produksi kosmetik palsu, dapat dipastikan bahwa standar keamanan ini pastinya tidak dipenuhi atau bahkan tidak dipedulikan.

Seringkali keluhan mengenai kosmetik palsu baru muncul ketika sudah muncul tanda-tanda alergi, iritasi atau bahkan keluhan lainnya. Dan seringkali keluhan ini akhirnya merugikan *brand* yang memproduksi kosmetik asli karena dianggap sebagai penyebab.

Lebih lanjut lagi, ketika konsumen merasa dirugikan, seringkali Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dijadikan sebagai dasar argumen tanpa benar-benar mengerti bahwa hak-hak yang dimiliki pastinya harus diimbangi adanya pemenuhan kewajiban yang dilakukan terlebih dahulu.

Dalam banyak diskusi hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan menjadi salah satu alasan yang sering digunakan sebagai dasar permintaan ganti rugi. Dalam pengajuan permintaan ganti rugi, tentu saja konsumen tidak bisa memaksa *brand* bersangkutan memberikan ganti rugi karena jelas-jelas kosmetik yang dibeli adalah kosmetik palsu.

Perlu diperhatikan, konsumen pun berkewajiban untuk mencari tahu informasi mengenai kosmetik yang ingin dibeli, apakah kandungan kosmetik tersebut aman bagi kulit, apakah harga yang ditawarkan di *marketplace* masih masuk akal dan tidak tergiur dengan harga yang sangat murah, sampai dengan ada tidaknya izin edar dari BPOM. Untuk pembelian kosmetik *online*, beberapa penjual seringkali menyertakan nomor izin edar di halaman produknya.

Lalu apa yang bisa dilakukan oleh konsumen? Konsumen tentu dapat mengecek terlebih dahulu informasi izin edar yang ada dan tidak langsung mempercayai nomor izin edar yang tertera karena seringkali nomor izin edar tersebut ketika diperiksa di *database* BPOM justru tidak terdaftar atau terdaftar atas produk lainnya yang tidak relevan.

Dengan adanya inisiatif pengecekan yang dilakukan secara mandiri oleh konsumen diharapkan agar potensi untuk membeli kosmetik palsu dapat dihindari. Hal ini dikarenakan penjualan kosmetik palsu sulit dihapuskan begitu saja karena selama masih banyaknya permintaan opsi kosmetik palsu yang lebih murah, peredaran kosmetik ini pastinya akan tetap ada.

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan Of Counsel JWK Law Office*

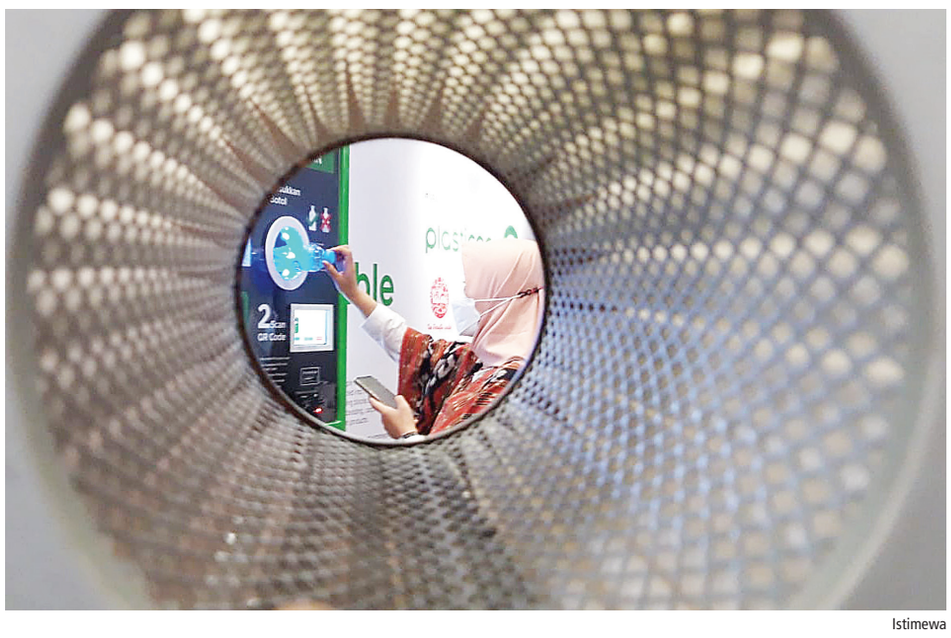

Istimewa

Teknologi Pengelolaan Sampah Plastik

Pengunjung berada di booth PT Plasticpay Teknologi Daurulang, pada gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2022, Jakarta, kemarin. PT Plasticpay Teknologi Daurulang, perusahaan platform perubahan perilaku sosial berbasis digital sekaligus entitas usaha dari PT Inocycle Technology Group Tbk (INOV), secara aktif terus mengembangkan inovasi dalam mengelola sampah plastik secara digital.

Utilisasi Industri Keramik Capai 82-83% Pada Kuartal I-2022

JAKARTA – Industri keramik mencatatkan hasil yang bagus pada Kuartal I-2022, dengan tingkat utilisasi berada di level 82-83%. Angka ini mendekati target utilisasi nasional yang diestimasikan sebesar 85% pada tahun ini.

Oleh **Leonard AL Cahyoputra**

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menerangkan, kinerja bagus tersebut ditopang oleh peningkatan permintaan dalam negeri dan kinerja ekspor yang mulai *rebound* kembali. Angka ekspor (dalam volume meter persegi) untuk periode Januari-Februari 2022 ini bertumbuh 20% jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

Sementara, jika dilihat secara volume dalam US dolar bertumbuh 6%. Permintaan export mulai pulih kembali untuk Filipina, Malaysia, Thailand, dan Amerika Serikat. "Industri Keramik saat ini bahkan sudah memasuki zona ekspansi, dimana pada 2021 ada tambahan kapasitas produksi baru sebesar 13 juta m2 dan pada tahun ini ada ekspansi baru 35 juta m2 dengan total capex Rp 3 triliun. Diharapkan ada penyerapan tenaga kerja baru sekitar 3.000 orang," ucap Edy kepada *Investor Daily*, Sabtu (9/4).

Edy mengatakan, semangat optimisme industri keramik harus didukung dengan kelancaran *supply* gas, yang mana sampai dengan saat ini industri keramik yang berada di Jawa Timur masih belum bisa berproduksi optimal. Ini karena gangguan pasokan gas dari PGN.

Daya saing industri keramik di Jawa Timur juga terganggu karena dikenai kuota pemakaian Gas harian dan alokasi gas industri tertentu yang pada akhirnya industri terpaksa harus membayar gas di atas harga US$ 6 yakni di angka US$ 7,98 sampai dengan US$ 15/mmbtu.

"Asaki mengharapkan pemerintah bisa memberikan kepastian dan kemudahan serta proses yang lebih cepat bagi eksisting industri keramik yang sedang melakukan ekspansi pada tahun 2022 ini," kata dia.

Edy mengungkapkan, Asaki menyambut baik pembangunan

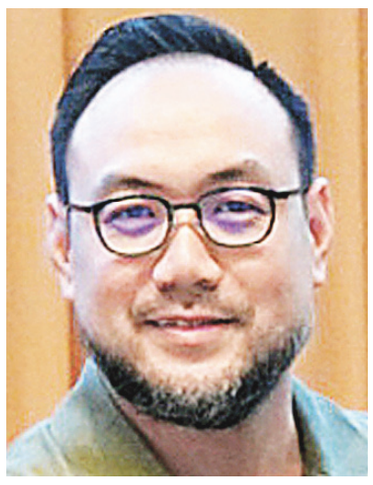

Edy Suyanto

Ibukota Negara di Kalimantan dan menyatakan siap untuk memenuhi semua kebutuhan infrastruktur bahan bangunan yang dibutuhkan seperti keramik lantai dan dinding, genteng atap dari bahan keramik dan *sanitary ware*.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakomtap Kadin Indonesia Bidang Industri Semen dan Keramik ini menerangkan, secara kualitas dan desain produk Lokal lebih baik dan bahkan lebih unggul dari sisi ketepatan waktu dan pelayanan purna jual. Dengan didukung volume produksi, industri keramik sangat mumpuni untuk memenuhi semua permintaan domestik yang tentunya akan bertambah seiring pembangunan IKN di Kalimantan.

"Hal tersebut didukung dengan rencana ekspansi kapasitas industri keramik yang merata, di mana berlokasi di Jawa Timur sebesar 18 juta dan Jawa bag Barat sebesar 17 juta dengan mayoritas jenis produk Homogeneous Tiles yang dipersiapkan untuk substitusi impor," kata Edy.

Edy mengungkapkan, industri keramik tidak ada pilihan selain melakukan penyesuaian harga jual keramik kepada konsumen mengikuti kebijakan pemerintah dengan tarif baru PPN 11% per April 2022.

"Berdasarkan hasil pengamatan Asaki sejauh ini terkait permintaan pasar pasca penyesuaian PPN 11% masih baik dan stabil karena salah satu katalis positif adalah trend permintaan keramik yang meningkat menjelang hari raya Idul Fitri," ucap dia.

Sebelumnya, tahun 2021 menjadi tahun membahagiakan bagi industri keramik karena mencatatkan hasil yang bagus di tengah pandemi Covid-19 yang entah kapan akan pamit. Dari segi tingkat utilisasi produksi nasional mampu meningkat ke level 75% dan produksi sebesar 400 juta hingga 410 juta m2. Menatap 2022, Asaki lebih percaya diri dapat tumbuh lebih baik dengan mematok target produksi keramik dapat menembus 460 juta hingga 470 juta m2 tahun ini atau tumbuh 15%.

Edy Suyanto menerangkan, produksi yang mencapai 400 juta hingga 410 juta m2 pada 2021 lebih bagus dari produksi 2020 yang mencapai 304 juta m2 atau naik 35%. Adapun, rata-rata utilisasi kapasitas produksi sepanjang tahun lalu telah pulih ke angka 75%, dimana merupakan angka utilisasi tersebut merupakan yang tertinggi sejak 2015.

Dia sangat mengapresiasi kinerja Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang sangat pro industri dengan kerja cepat, inovatif serta tanggap terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi industri dalam negeri. Khususnya saat menghadapi resesi perekonomian nasional akibat pandemi Covid'19. Disamping itu juga Asaki mengapresiasi dukungan KemenPUPR yang sepenuhnya mendukung pemanfaatan produk keramik dalam negeri untuk properti dan infrastruktur.

"Asaki memiliki optimisme pada 2022 tingkat utilisasi bisa meningkat dari 75% ke 85% seiring dengan keberhasilan pemerintah di dalam pengendalian pandemi Covid dan target pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5%-5,2% pada 2022. Untuk produksi, kita optimis bisa mencapai angka 460 juta m2 hingga 470 juta m2 atau naik sekitar 15% dibandingkan tahun lalu," ucap Edy.

Penerapan PMK No. 15/2022 Dapat Kendalikan Baja Impor

JAKARTA – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KS) sebagai petitioner atau pemohon dalam pengajuan BMAD atas impor produk HRC Alloy dari RRT, beberapa waktu lalu mengadakan sosialisasi penerapan PMK No. 15 Tahun 2022 melalui acara Focus Group Discussion (FGD) yang bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dan Kantor Bea & Cukai Merak, Kementerian Keuangan.

Pada 22 Februari 2022, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) Terhadap Impor Produk Hot Rolled Coil of Other Alloy (HRC Alloy) dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan berlaku efektif pada 15 Maret 2022.

Direktur Komersial Krakatau Steel Melati Sarnita mengatakan, kebijakan pemberlakuan BMAD tersebut merupakan salah satu wujud nyata Pemerintah Indonesia dalam upaya melindungi industri baja nasional dari praktek unfair trade yang secara nyata telah memberikan dampak negatif bagi perkembangan industri baja nasional.

PMK tersebut mengatur pengenaan Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor produk HRC Alloy asal RRT yang termasuk dalam pos tarif ex.7225.30.90 sebesar 4,2%-50,2% untuk periode pengenaan selama lima tahun dimana spesifikasi produk baja impor yang dikenakan BMAD adalah memiliki kandungan Boron (B) 0,0008% - 0,003%; atau memiliki kandungan Boron (B) 0,0008% - 0,003% dan Titanium (Ti) ≤ 0,025%.

"Harapannya, dengan berlakunya BMAD tersebut dapat secara efektif untuk mengendalikan barang impor dumping dan circumvention," jelas Sarnita dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, pada akhir pekan lalu.

Ketua Tim Penanganan Permasalahan/Sengketa Investasi dan Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi Leo Mualdy Christoffel menyampaikan, kebijakan pemerintah ke depan adalah hilirisasi di mana hilirisasi penting untuk pengembangan kegiatan ekonomi yang lebih kompleks, sehingga kegiatan ekonomi di Indonesia lebih terdiversifikasi. Komitmen pemerintah ke depan yaitu mendorong dan mendukung investasi dengan menciptakan kegiatan ekonomi yang sehat.

"Untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang sehat, pengenaan instrumen trade remedies yang salah satunya pengenaan anti dumping sangat efektif untuk mengatasi praktek unfair trade seperti dumping maupun circumvention (Pengalihan kode HS). Hal ini perlu diberlakukan untuk melindungi industri dalam negeri, " ujar Wakil Ketua KADI Herliza. **(leo)**

MAP active

PT. MAP AKTIF ADIPERKASA TBK DAN ENTITAS ANAK

Sahid Sudirman Center Lantai 26, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220
Tel. 021 - 8064 8488, Fax. 021 - 2788 9888
Website: www.mapactive.id Email: corpsec@mapactive.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	662.414	599.348
Piutang usaha		
Pihak berelasi	47.381	57.970
Pihak ketiga - bersih	238.057	197.120
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi	1.865	12.294
Pihak ketiga	29.216	23.653
Persediaan - bersih	2.278.559	2.278.434
Uang muka	74.414	38.194
Pajak dibayar dimuka	146.033	145.021
Biaya dibayar dimuka	25.637	50.998
Jumlah Aset Lancar	3.503.576	3.403.032
ASET TIDAK LANCAR		
Aset pajak tangguhan - bersih	53.495	45.654
Aset tetap - bersih	653.306	728.317
Aset hak-guna - bersih	791.906	898.344
Goodwill dan aset takberwujud lainnya	79.437	79.437
Biaya lisensi yang ditangguhkan dan merek - bersih	15.111	17.764
Uang jaminan	187.138	177.415
Uang muka pembelian aset tetap	4.831	1.682
Aset tidak lancar lainnya	30.397	30.397
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.815.621	1.979.010
JUMLAH ASET	5.319.197	5.382.042

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank	62.246	493.256
Utang usaha		
Pihak berelasi	4.213	5.406
Pihak ketiga	514.593	472.151
Utang lain-lain		
Pihak berelasi	23.194	25.080
Pihak ketiga	220.819	275.603
Utang pajak	146.218	42.778
Biaya yang masih harus dibayar	202.561	111.090
Pendapatan diterima dimuka	16.934	8.789
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Liabilitas sewa	392.426	388.070
Utang pembelian kendaraan	1.165	1.932
Instrumen keuangan derivatif	233	51
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.584.602	1.824.206
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Liabilitas sewa	317.770	348.998
Utang pembelian kendaraan	44	1.208
Liabilitas imbalan kerja	151.229	189.567
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	323	907
Provisi biaya pembongkaran aset tetap	34.314	28.029
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	503.680	568.709
Jumlah Liabilitas	2.088.282	2.392.915
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham		
Modal dasar - 5.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor - 2.850.400.000 saham	285.040	285.040
Tambahan modal disetor - bersih	825.655	825.655
Penghasilan komprehensif lain	8.685	10.828
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	5.000	5.000
Tidak ditentukan penggunaannya	2.106.657	1.849.269
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	3.231.037	2.975.792
Kepentingan Non-pengendali	(122)	13.335
Jumlah Ekuitas	3.230.915	2.989.127
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	5.319.197	5.382.042

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2021	2020
PENDAPATAN	6.042.002	4.781.480
BEBAN POKOK PENJUALAN	(3.455.042)	(2.869.439)
LABA KOTOR	2.586.960	1.912.041
Beban penjualan	(1.783.980)	(1.575.954)
Beban umum dan administrasi	(323.510)	(256.050)
LABA USAHA	479.470	80.037
Beban keuangan	(81.709)	(97.268)
Kerugian penghapusan/penjualan aset tetap	(19.320)	(21.727)
Penyisihan dan pemulihan penurunan nilai persediaan - bersih	(27.243)	(21.385)
Keuntungan instrumen keuangan derivatif - bersih	27	4.962
Penghasilan bunga	6.133	16.513
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	(4.596)	25.805
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	(8.748)	3.989
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	344.014	(9.074)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	(113.619)	13.412
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	230.395	4.338
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti	13.412	5.508
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(15.735)	4.910
Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	(2.323)	10.418
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	228.072	14.756
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	257.388	2.078
Kepentingan Non-pengendali	(26.993)	2.260
Laba Bersih Tahun Berjalan	230.395	4.338
JUMLAH PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	255.245	12.902
Kepentingan Non-pengendali	(27.173)	1.854
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	228.072	14.756
LABA PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah penuh)	90	1

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	6.019.897	4.732.247
Pembayaran kas kepada karyawan	(711.120)	(704.726)
Pembayaran kas kepada pemasok	(3.424.244)	(3.225.426)
Pembayaran kas untuk beban operasional lainnya	(969.433)	(640.801)
Kas dihasilkan dari operasi	915.100	161.294
Penerimaan restitusi pajak penghasilan	21.123	8.070
Pembayaran pajak penghasilan	(52.119)	(109.710)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	884.104	59.654
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan bunga	6.182	16.617
Penerimaan hasil penjualan aset tetap	919	1.943
Penempatan uang jaminan	(13.672)	(1.509)
Penambahan uang muka pembelian aset tetap	(4.831)	(2.221)
Akuisisi entitas anak	-	(101.325)
Perolehan aset tetap	(107.559)	(104.092)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(118.961)	(190.587)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penambahan utang bank	273.004	1.140.727
Kenaikan piutang dan utang kepada pihak berelasi - bersih	1.445	26.333
Penerimaan dari penerbitan modal disetor entitas anak dari kepentingan non-pengendali	13.716	15.278
Pembayaran dividen tunai oleh entitas anak kepada kepentingan non-pengendali	-	(1)
Pembayaran bunga dan beban keuangan	(36.239)	(36.976)
Pembayaran utang pembelian aset tetap	(39.908)	(43.948)
Pembayaran liabilitas sewa (termasuk beban bunga liabilitas sewa)	(213.940)	(184.827)
Pembayaran utang bank	(700.155)	(732.270)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(702.077)	184.316
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	63.066	53.383
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	599.348	545.965
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	662.414	599.348

Jakarta, 11 April 2022
S.E. & O
DIREKSI
PT MAP AKTIF ADIPERKASA TBK

Catatan:
Informasi keuangan pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota dari Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte), yang telah memberikan opini tanpa modifikasian.